

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang konteks dari praktik jurnalisme publik oleh Tirto.id, Vice Indonesia, dan The Jakarta Post serta digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan analisis data. Deskripsi objek penelitian ini terdiri dari: praktik jurnalisme publik di Indonesia dan di Amerika Serikat. Sementara, deskripsi subjek penelitian ini terdiri dari profil informan dan profil media Tirto.id, Vice Indonesi, dan The Jakarta Post.

#### **A. Objek Penelitian**

Praktik jurnalisme publik semula diawali di AS. Kemudian, Indonesia mulai mengadopsi prakti ini setelah melewati masa orde baru atau adanya kebebasan pers. Berikut ini praktik jurnalisme publik di Amerika Serikat dan di Indonesia.

##### **1. Praktik jurnalisme publik**

Definisi praktik atau tugas jurnalisme publik disampaikan oleh beberapa ahli. *Pertama*, menurut Page (dalam Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 34) praktik jurnalisme publik adalah sebuah cara yang bertujuan untuk membuat pendapat alternatif lebih terdengar, membangun pemahaman, merangsang deliberasi, dan membantu memimpin komunitas agar dapat memperoleh solusi atas masalahnya. *Kedua*, Albert Dzur (dalam Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 34) menekankan bahwa jurnalisme publik mengambil arah yang berbeda dari jurnalisme tradisional.

Selain itu, jurnalisme publik juga bertugas untuk memperhatikan suara publik dalam proses pencarian berita, memproduksi berita yang berkualitas, dan mendorong munculnya dialog publik. Praktik jurnalisme publik di Amerika secara tautologis menekankan nilai-nilai mendasar yang seharusnya telah terkandung pada jurnalisme Amerika. Amandemen Pertama di Amerika Serikat mengharuskan agar pers memegang kewajibannya untuk bertanggung jawab pada publik, membela kepentingan publik seperti di wilayah pendidikan, makanan, kesehatan, hukum,

terutama ketika kepentingan publik terancam (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 34).

Sementara itu Nip (2006, p. 10) menyampaikan perbedaan antara praktik jurnalisme tradisional dan jurnalisme publik. Jurnalisme tradisional adalah praktik ketika jurnalis bertugas untuk menjadi penjaga gerbang. Jurnalis sebagai penjaga gerbang tugasnya adalah menyaring peristiwa dan melaporkan peristiwa ini kepada hadirin. Bedanya dengan jurnalisme publik adalah pada keterkaitannya dengan tanggung jawab pada masalah publik.

Berdasarkan beragam definisi, makna dan historisitas jurnalisme Amerika Serikat (AS), setidaknya memiliki sejumlah ciri. Ciri-ciri jurnalisme publik apabila dibandingkan dengan ciri jurnalisme tradisional, yaitu:

(1) Memandang audiens sebagai warga

Menurut Meijer Audiens tidak dianggap semata-mata hanya sebagai konsumen, melainkan warga yang memiliki hak maupun kewajiban politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak dan kewajiban warga adalah kepentingan warga. Implikasi dari hal tersebut adalah jurnalisme publik bekerja untuk audiens sebagai warga yang berkepentingan, bukan audiens sebagai konsumen. Sehingga warga dalam hal ini adalah audiens aktif yang menghargai informasi dan memanfaatkannya untuk kehidupan personal maupun sosial (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 35).

(2) Masalah publik dasar maupun kompleks

Jurnalisme publik menyajikan sejumlah informasi substansial yang mendasar maupun kompleks, masalah dan solusi terkait kebijakan publik, bukan penonjolan sensasionalitas dan irasionalitas. Setidaknya terdapat dua tipe isu yang menjadi perhatian publik. Isu pertama adalah isu kebijakan yang berdampak jangka panjang. Isu kedua adalah isu informasi sipil dasar.

Dalam kasus isu kedua ini berarti, pemberitaan media arus utama pada pemilihan presiden (pilpres) AS harus jelas menonjolkan pernyataan-pernyataan provokatif daripada memberitakan konteks, ataupun tidak memeriksa tindakan-

tindakan nyata dari para kandidat. Sehingga, pada akhirnya isu yang disampaikan, siapa saja yang menjadi sumber laporan, dan solusi yang muncul lebih menentukan tingkat relevansi jurnalisme publik pada kebutuhan nyata warga ketimbang melaporkan sesuatu secara akurat dan objektif belaka (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 36).

### (3) Kolaborasi jurnalis dan publik

Keterlibatan publik dalam penentuan dan penyusunan berita sebab media mau mendengarkan publik dan memahami adanya pluralisme publik. Pelaporan fakta secara akurat tidak cukup. Contoh kolaborasi jurnalis dan publik, yaitu ketika publik sebagai pembaca menyarakankan topik untuk diberitakan atau sumber-sumber alternatif yang perlu dikutip. Pembaca dapat ikut bekerja dengan jurnalis profesional untuk melakukan riset komplementer dan menulis bersama kisah-kisah itu (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 37).

Dalam peristiwa terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS ke-45, kecenderungan jurnalis adalah tidak mencari tahu secara langsung kepada publik. Menurut Pachico (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 38) pasalnya, media cetak lokal pun telah kehabisan energi untuk menggali komunitas-komunitasnya sendiri. Hal ini disebabkan karena masalah sosial yang membelit. Media AS tidak menangkap nalar publik yang tengah berlangsung pada proses pilpres tersebut.

### (4) Transparansi dan akuntabilitas

Berbeda dengan jurnalisme tradisional, jurnalisme publik terbentuk manakala media yang bersangkutan sifatnya transparan dan akuntabel. Transparansi berarti proses jurnalistik, idealisme, dan prinsip-prinsip terbuka untuk diketahui publik sebelum, selama, dan setelah konten berita tercipta. Sementara akuntabilitas berarti komunikasi publik yang berlangsung dapat diketahui oleh muasal.

Kedua prinsip ini bertujuan untuk mencegah organisasi berita dan jurnalis menyusun berita dari sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan lebih mendorong jurnalis untuk mengumpulkan informasinya sendiri. Pasalnya,

organisasi berita seringkali tidak percaya diri untuk melaporkan pernyataan-pernyataan publik tanpa disertai dengan data polling pada suatu proses politik. Bersandar pada hasil polling rupanya tidak selalu menunjukkan realitas. Polling pra-pilpres AS selalu menunjukkan bahwa Hillary Clinton mengungguli Donald Trump. Sehingga, jurnalis menyingkirkan suara dari publik yang berpihak pada Trump (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 40).

#### (5) Deliberasi atau penguatan musyawarah publik dan pluralisme

Dalam hal ini, media tidak terpaku pada keterangan para elit belaka. Sehingga, jurnalis tidak hanya melaporkan tapi juga meluaskan peran mereka dengan membantu publik dalam memberikan perhatian dan bertukar pikiran mengenai urusan-urusan publik. Perilaku media arus utama di AS yang selalu berpihak pada Clinton justru menjadi bumerang bagi para pemilih non-demokrat. Jurnalis akhirnya hanya mencari informasi dari berbagai sumber jurnalisisme maupun non-jurnalisisme lainnya.

Penggunaan istilah jurnalisisme publik di Indonesia pertama kali diperoleh atas adanya perdebatan akademik Indonesia yang dilakukan oleh Yenni Yuniati dan Atie Rachmiatie (dalam Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 70) dalam “Komitmen Wartawan dalam Jurnalisisme Publik”. Mereka memaparkan sejumlah praktik jurnalisisme Indonesia yang bermasalah. Sebagian besar dari masalah tersebut adalah praktik konglomerasi media, Jakartasentrisme, dan sebagainya.

Atas permasalahan tersebut, Yuniati dan Rachmiati (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 71) pun memaparkan definisi dari jurnalisisme publik. Menurut mereka jurnalisisme publik adalah praktik dari jurnalisisme untuk menyelenggarakan dialog publik mengenai masalah publik. Sehingga dalam hal ini jurnalis memfasilitasi masyarakat untuk mencari solusi atas masalah dan isu yang dihadapinya. Maka penting agar praktik jurnalisisme publik di Indonesia lebih membahas tentang kepentingan publik yang disajikan pada media penyiaran. Tapi, karena praktik jurnalisisme publik sebagian besar didominasi dengan konglomerasi jadi dalam media kerap bersikap egois dengan mencari keuntungan daripada memprioritaskan kepentingan publik.

Hal tersebut disampaikan oleh Dedy Mulyana (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 71) yang menyinggung pentingnya lembaga penyiaran agar menjadi ruang diskursus dan memfasilitasi pencarian solusi atas masalah publik. Sementara itu, pemikiran Siregar (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 73) terkait jurnalisme publik di Indonesia beririsan tentang jurnalisme publik di Amerika Serikat. Adapun beberapa irisan dari pemikiran Siregar terhadap praktik jurnalisme publik di Amerika Serikat.

(1) Informasi substansial.

Pada dimensi pertama ini, berarti jurnalisme memproses fakta publik menjadi informasi jurnalisme. Siregar (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 73) menyampaikan bahwa untuk menjadi informasi jurnalis, maka fakta publik harus melalui dua proses. Proses pertama adalah sejauh mana pelaku profesi media massa terjamin dalam menjalankan kewajibannya dalam mencari fakta-fakta bersifat publik yang dapat dijadikan informasi jurnalisme.

Proses kedua adalah sejauh mana pelaku yang memiliki peran publik memiliki kewajiban untuk memberikan fakta di bawah kewenangan kepada pelaku profesi jurnalisme untuk dijadikan informasi jurnalisme.

(2) Pluralisme publik

Siregar Siregar (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 74) menekankan pentingnya suara warga diwaliki jurnalisme dan dalam keberagaman media. Proses menyatakan pendapat dapat dilakukan dengan dua cara. Proses pertama adalah sejauh mana masyarakat terjamin haknya untuk membentuk dan menyatakan pendapatnya, baik dalam bentuk informasi publik melalui diversitas media jurnalisme. Proses kedua adalah sejauh mana pengelola media jurnalisme berkewajiban untuk menampung pendapat masyarakat.

(3) Masalah bersama

Menurut Siregar (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 75) masalah publik adalah fakta yang berasal dari dan respons masyarakat terhadap kekuasaan umum serta khusus. Dalam proses ini, jurnalisme berperan untuk menyiarkan fakta

dan masalah publik secara bebas dalam kaidah objektivitas sebagai informasi jurnalisme.

(4) Diskusi publik

Diskusi publik adalah proses dialektika antara sejumlah nilai normatif beserta kenyataan empiris di kehidupan publik. Selain itu, diskusi publik juga dimaknai sebagai proses yang turut membentuk *shared values* dan opini publik. *Shared values* diproduksi, direproduksi, ataupun bertransformasi melalui diskusi publi yang difasilitasi oleh media pers. Melalui diskusi ini, maka akan tercipta opini publik. Opini publik inilah yang menjadi dasar kebijakan pemerintau ataupun insititusi lain di masyarakat.

(5) Akuntabilitas sosial

Dalam hal ini, akuntabilitas sosial berarti pertanggung jawaban dari jurnalistik atas pengumpulan fakta publik hingga terciptanya masalah publik. Akuntabilitas sosial ini melekat pada jurnalisme yang memiliki peran pada ruang publik (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 76).

**Tabel 1. Perbandingan Konsep Jurnalisme Publik Indonesia dan AS**

Elemen	Jurnalisme Publik	
	Amerika Serikat	Indonesia
Jurnalis memandang audiens sebagai warga	√	√
Masalah publik dasar maupun kompleks	√	√
Kolaborasi jurnalis dan warga	√	-
Transparansi dan akuntabilitas	√	√

Elemen	Jurnalisme Publik	
	Amerika Serikat	Indonesia
Dialog publik	√	√
Objektivitas	-	√
Pluralisme Publik	√	√

**Sumber:** (Ambard, Parahita, Lindawati, & Sukarno, 2018, p. 78)

## **B. Subjek Penelitian**

### 1. Tirto.id

Tirto.id adalah situs berita, laporan, opini, infografik yang didirikan pertama kali pada bulan Februari 2016. Situs berita ini, diresmikan pada Agustus 2016. Tirto.id dimiliki oleh PT Tirta Adi Surya. Nama pemilik Tirto.id sendiri adalah Atmaji Sapto Anggoro, yang juga menjabat sebagai Pimpinan Redaksi, serta CEO. Nama Tirto.id sendiri diambil dari pahlawan nasional bapak pers, yaitu Tirto.id Adhi Soerjo. Dirinya mendirikan surat kabar bernama, Soenda Berita, Medan Prijaji, dan Poetri Hindia. Tidak hanya itu Bapak Tirto.id juga membentuk Sarekat Dagang Islam (SDI) (Tirto.id, 2016, para. 3).

Selain itu, Tirto.id juga aktif di sosial media, seperti Instagram, dan Twitter. Pada *platform visual* tersebut, Tirto.id seringkali menyajikan infografik. Tidak hanya mengajak membaca, Tirto.id juga menyediakan media berupa Podcast. Podcast ini diberi nama INSENTIF. Podcast INSENTIF pertama kali tayang pada Juli 2020, yang tiap audionya berdurasi 10 menit. Podcast INSENTIF dapat diputar di berbagai *platform* dari Spotify, hingga *website* Tirto.id sendiri (Podmailer, 2020, para. 1).

Tirto.id berpusat di Jakarta. Peran Tirto.id biro Yogyakarta adalah sebagai pemberi bantuan kepada Tirto Jakarta untuk membuat laporan dengan jenis suplemen konten atau laporan pelengkap. Koordinasi untuk setiap laporan dilakukan setiap hari via *online* antareditor. Kemudian, Tirto.id biro Yogyakarta memiliki target tulisan sebanyak 100 laporan per hari pada jenis laporan suplemen konten (Agung Dwi Hartanto, Wawancara, 13 November 2020).

Pejabat sementara Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Tirto.id adalah Ivan Aulia Ahsan. Kemudian, Pejabat sementara Pemimpin Redaksi adalah Agung D.H. Lalu, Redaktur Eksekutifnya dipimpin oleh Nurul Qomariyah Pramisti dan Redaktur Utamanya adalah Fahri Salam bersama Nuran Wibisono.

### 2. Vice Indonesia

VICE Indonesia adalah media dengan modal asing yang berdiri sebagai biro dari media digital berbasis gaya hidup. VICE Indonesia berpusat di New York, Amerika Serikat. Media digital ini berfokus pada isu-isu dengan sudut pandang berbeda dari media arus utama (Febriani & Fadilah, 2019, p. 177).

Direktur Vice Indonesia Mo Morris (Eka, 2016, para. 4) menyatakan bahwa Indonesia adalah lokasi yang tepat untuk mendirikan kantor pertama Vice di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena negara ini memiliki kelas menengah yang tumbuh pesat dengan populasi anak muda yang besar. Sehingga, sangat relevan dengan konten-konten Vice.

Akhirnya, Vice Indonesia resmi didirikan pada tahun 2016 dan berlokasi di Jakarta Selatan. VICE Indonesia memiliki beberapa akun media sosial yang digunakan untuk memberikan beragam informasi terbaru kepada masyarakat, yaitu Twitter, Website, Youtube, Instagram, dan Facebook. Masing-masing dari media sosial tersebut, memberikan konten-konten berupa tulisan maupun video kepada audiens. Tidak jarang, media *online* ini memberikan konten hiburan di Twitter. Ardyan M. Erlangga adalah *Managing Editor* dari Vice Indonesia sejak Oktober 2016 dan masih berlangsung hingga saat ini.

### 3. The Jakarta Post

The Jakarta Post adalah surat kabar harian dalam bahasa Inggris di Indonesia. Surat kabar ini dimiliki oleh PT Bina Media Tenggara yang berkantor pusat di Jakarta. Semula, The Jakarta post adalah kolaborasi antara empat media Indonesia di bawah arahan Menteri Penerangan Ali Moertopo dan politikus Jusuf Wanandi. Setelah laporan pertamanya rilis pada tanggal 25 April 1983, The Jakarta Post akhirnya terbit dengan sedikit iklan dan peningkatan sirkulasi (Ayuwuragil, 2021, p. 1).

Kemudian, setelah pergantian kepala editor pada tahun 1991 The Jakarta Post mulai mengambil posisi pro-demokrasi. The Jakarta Post adalah salah satu harian Indonesia berbahasa Inggris yang bertahan dari krisis keuangan Asia 1997 dan saat ini memiliki sirkulasi sebesar 40.000 eksemplar. Kemudian, telah memiliki 41.049 pelanggan pada bulan Desember 1998 (Ayuwuragil, 2021, p. 1).



Lalu, pada tahun 1994, Jakarta Post menjadi surat kabar pertama di Indonesia yang berhasil go internasional di bawah proyek bernama "*Go International*". *Proyek Go International* adalah perwujudan nyata dari misi Jakarta Post untuk membawa perspektif Indonesia ke dalam isu-isu nasional dan internasional di tengah pandangan negara Barat yang mendominasi aliran informasi dunia. Kala itu, Jakarta Post berkomitmen untuk hadir sebagai "Jurnal Indonesia Masa Kini". Koran ini menyanggupi tantangan untuk terus menyediakan berita, hiburan dan pandangan terbaru kepada masyarakat dunia (Ayuwuragil, 2021, p. 1).

The Jakarta Post memiliki edisi Minggu (*Sunday*) dan Daring (*Online*), yang isinya tidak ditemukan di edisi cetak harian. Harian ini menargetkan publik asing dan Indonesia berpendidikan, meski begitu jumlah pembaca Indonesia dari kelas menengah juga terus meningkat. Terkenal sebagai tempat latihan para reporter lokal dan internasional, The Jakarta Post telah memenangkan sejumlah penghargaan dan dijuluki sebagai "harian berbahasa Inggris terdepan di Indonesia" (Ayuwuragil, 2021, p. 1).

Beberapa tim editorial The Jakarta Post, yaitu *Editor-in-Chief/Guarantor* dipimpin oleh M. Taufiqurrahman. Kemudian, *Managing Editors* dikendalikan oleh Adisti Sukma Sawitri, Marcel Thee Senior Editors Endy M. Bayuni, Vincent Lingga, dan Kornelius Purba.

#### 4. Profil informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang. Semua informan yang berhasil diwawancarai oleh peneliti merupakan jurnalis yang terlibat dalam penyusunan Laporan Nama Baik Kampus.

##### a. Gemma Holliani Cahya

Gemma Holliani Cahya adalah *ex-reporter* the Jakarta Post yang ikut dalam kolaborasi Nama Baik Kampus. Ia adalah reporter yang fokus di topik pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan. Gemma Holliani Cahya bekerja sejak tahun 2017 hingga 2020 di The Jakarta Post.

##### b. Evi Mariani

Evi Mariani sudah bekerja di The Jakarta Post semenjak November 2002 sebagai jurnalis. Kemudian, bekerja sebagai *Managing Editor* di The Jakarta Post sejak Maret 2008.

c. Aulia Adam

Aulia Adam adalah Reporter yang menulis isu hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan dan film di Tirto.id sejak 2016.

d. Fahri Salam

Fahri Salam pernah bekerja di Yayasan Pantau, kemudian menulis buku berjudul *Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh* (Insist, 2015), menyunting beberapa buku jurnalisisme termasuk *#NARASI: Antologi Prosa Jurnalisisme (Pindai, 2016)*. Fahri Salam bergabung di Tirto.id sejak Desember 2016

e. Ardyan M Erlangga

Ardyan bekerja sebagai jurnalis Vice Indonesia sejak Februari 2011. Kemudian, bekerja sebagai Redaktur Pelaksana di Vice Indonesia sejak Oktober 2016.